

**RANCANGAN AKHIR  
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
SEMESTA BERENCANA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI  
TAHUN 2022**



**2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan Sesanti Angayubagia terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali ini adalah untuk dapat memberikan panduan dan informasi kepada semua pihak yang terkait dengan keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 dalam rangka pembangunan di sektor perikanan dalam arti luas dan untuk meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan produksi, nilai tambah dan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan yang pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

Demikian semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perikanan pada tahun 2022.

Bali, 14 September 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Bali



Ir. I Made Sudarsana, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650810 199203 1 017

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penyusunan Renja .....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Triwulan II Tahun Berkenaan.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali .....	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD .....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	22
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>24</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	24
3.3 Progran Dan Kegiatan.....	25
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI.....</b>	<b>27</b>
<b>BABV PENUTUP.....</b>	<b>28</b>
5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Pelaksanaan Dan Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan .....	28
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....	28
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	29

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan disektor Kelautan dan Perikanan memiliki peranan yang sangat strategis terhadap pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi, pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyerapan tenaga kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan konsumsi ikan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, maka *strategi pembangunan kelautan dan perikanan* yang ditempuh adalah Optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dengan tetap terjaga kelestariannya, Pemberdayaan masyarakat, Penguatan modal, Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan serta penyediaan benih/induk berkualitas dan Modernisasi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan ke depan lebih ditekankan pada pengendalian perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan dan peningkatan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk yang mengarah pada pengembangan industri kelautan dan perikanan yang terpadu berbasis masyarakat.

Untuk itu, kebijakan operasional pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan adalah Pengembangan komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan, Meningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan, Meningkatkan lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan perkapita dan kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan kerja sama penelitian dan pengelolaan potensi laut, dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh.

Dalam pasal 11 disebutkan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat; selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Sementara dalam pasal 1 ayat 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah

yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dalam jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2022. Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2022 diajukan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Perubahan Provinsi Bali tahun 2022 dan setelah penetapan RKPD Perubahan Provinsi Bali tahun 2022, Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2022 diverifikasi oleh Bappeda Provinsi Bali selanjutnya diajukan untuk mendapat pengesahan dari Gubernur Bali.

Proses penyusunan Rancang Akhir Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2022 didasarkan pada Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2018-2023. Renja didasarkan pada Rancangan Akhir Teknokratik RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 serta hasil evaluasi RPJMD Provinsi Bali 2013-2018. Konskuensi logis dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 2018-2023, maka penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2021, wajib mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

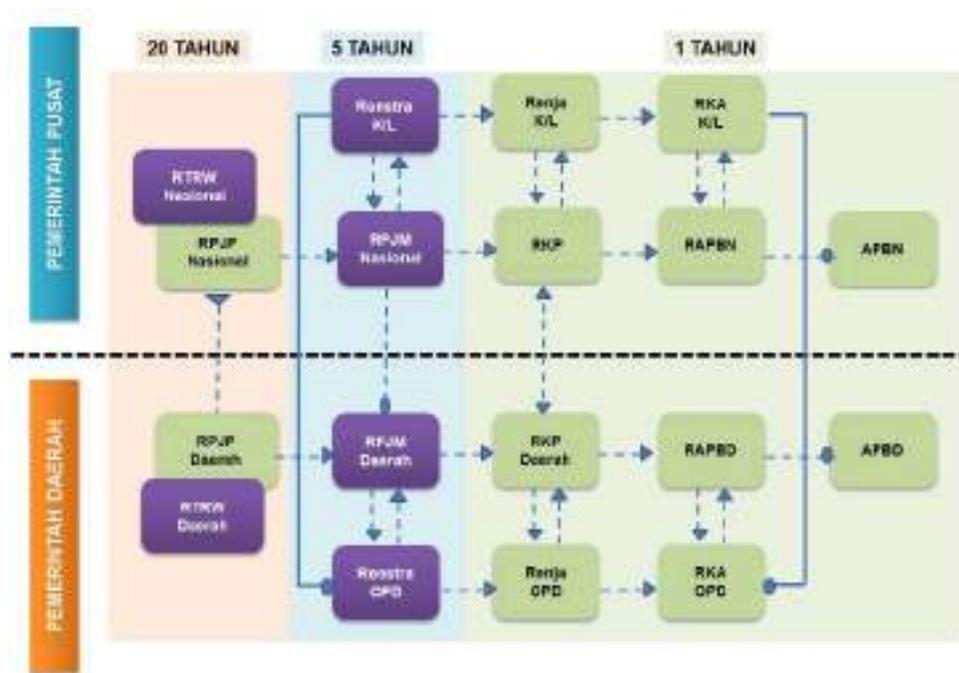
Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 didasarkan pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 4590 Tahun 2022 Tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penyampaian Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 Sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2022 diawali dengan mengajukan Rancangan Akhir keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, selanjutnya orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Penyusunan Rancangan Akhir keputusan Kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renja Perangkat Daerah diajukan melalui Bappeda Provinsi Bali. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah dilakukan secara internal pada Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali dengan mengundang Bappeda Provinsi Bali dengan materi orientasi meliputi tugas

pokok dan fungsi Tim Penyusun Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022, penyamaan persepsi tentang tata cara penyusunan Renja Perangkat daerah dan kesiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD), Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

**Diagram 1.1**

Hubungan Dokumen Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan,Dokumen,Perencanaan Lainnya



Mengacu pada gambar diatas dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Renja PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Renja PD mengacu pada perubahan RKPD sebagai dampak adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi, dengan mengacu pada Rensra PD, Renja PD dan KUPA/PPAS menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD, selanjutnya akan menjadi acuan DPA PD, yang merupakan penjabaran dari APBD.

## 1.2 Landasan hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7).
- 12) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
- 13) Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- 14) Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- 15) Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Sebagaimana diuraikan di Atas bahwa maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2022 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 khususnya Rencana Kerja Tahun 2022 serta sebagai bahan masukan pada penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2022 dan setelah RKPD Perubahan ditetapkan, maka Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2022 akan disesuaikan pada RKPD Perubahan tersebut.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2022 adalah :

- 1) Menjabarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 terutama pada tahun 2022;

- 2) Merancang program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2022;
- 3) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
- 4) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022.

#### **1.4 Sistematika Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022**

Sistematika Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

BAB II. Tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Berkenaan berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Triwulan II Tahun Berkenaan dan capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 3) Review

terhadap Rancangan Akhir RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**

Pada Bab III Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, dan 3) Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**

Bab IV. Renja Perangkat Daerah; diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab V Penutup; Pada bab ini diuraikan antara lain : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**PROVINSI BALI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Dalam BAB II; Tentang Hasil Evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Triwulan II Tahun Berkenaan : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 3) Review terhadap Rancangan Akhir RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali pada tahun 2021 melaksanakan urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan . Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Kelautan dan Perikanan tetap dinyatakan sebagai Urusan Pilihan.

**2.2.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan**

Tugas Pokok Dinas adalah:

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya

Fungsi Dinas adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi.
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang kelautan dan perikanan
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data tahun 2022, komposisi kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.1.1**  
**Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	23
3	Strata 1	55
4	Diploma IV	5
5	Diploma III	1
6	Diploma II	-
7	Diploma I	1
8	SLTA / Sederajat	30
9	SLTP / Sederajat	1
10	SD	1
<b>Total</b>		<b>117</b>

**Tabel 2.1.1.2**  
**Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	21
2	Golongan III	70
3	Golongan II	25
4	Golongan I	1
<b>Total</b>		<b>117</b>

**Tabel.2.1.1.3**  
**Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan Struktural**

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	9
3	Eselon IV	27
4	Fungsional	80
<b>Total</b>		<b>117</b>

Pada tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam upaya mewujudkan visi dan misi Provinsi Bali dalam Urusan Kelautan dan Perikanan melaksanakan 5 Program, 8 Kegiatan, dan 12 Sub Kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2022 sebagai hasil pelaksanaan Renstra tahun keempat akan diuraikan secara detail berikut ini:

Tabel 2.1.5

## Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		
								Kinerja	ANGGARAN (Rp)	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2					3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									26.209.901.797		11.448.478.657		43,68%	
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									13.720.872.146		6.524.588.068		47,55%	
1	3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	Nilai	12.979.018.238	40	6.026.348.368	50,63%	46,43%
	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	52	Dokumen	11.330.640.382	26	5.321.128.656	50,00%	46,96%
	3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	11.330.640.382	6	5.321.128.656	50,00%	46,96%
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	124.712.380	6	63.859.239	50,00%	51,21%
	3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	12	Bulan	124.712.380	6	63.859.239	50,00%	51,21%
	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.523.665.476	6	641.360.473	50,00%	42,09%
	3	25	01	1.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	533.237.984	6	319.668.360	50,00%	59,95%

3	25	01	1.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	807.877.492	6	317.574.313	50,00%	39,31%
3	25	01	1.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	182.550.000	6	4.117.800	50,00%	2,26%
3	25	02				<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>4</b>	<b>Kelompok</b>	<b>147.182.196</b>	<b>0</b>	<b>34.849.820</b>	<b>0,00%</b>	<b>23,68%</b>
3	25	02	1.03			<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Meningkatnya kesejahteraan petani garam</b>	<b>4</b>	<b>Kelompok</b>	<b>147.182.196</b>	<b>0</b>	<b>34.849.820</b>	<b>0,00%</b>	<b>23,68%</b>
3	25	02	1.03	01		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok usaha garam yang difasilitasi	4	Kelompok	147.182.196	0	34.849.820	0,00%	23,68%
2	25	03				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah produksi perikanan tangkap</b>	<b>105.165,51</b>	<b>Ton</b>	<b>469.284.796</b>	<b>47.756,21</b>	<b>425.578.040</b>	<b>45,41%</b>	<b>90,69%</b>
2	25	03	1.01			<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil</b>	<b>Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan dan Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan Perikanan Tangkap</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>469.284.796</b>	<b>1</b>	<b>425.578.040</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,69%</b>
2	25	03	1.01	03		Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang Mengikuti Sosialisai Perizinan Perikanan Tangkat	30	Orang	469.284.796	0	425.578.040	0,00%	90,69%
2	25	06				<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Jumlah produk yang bersertifikat</b>	<b>149</b>	<b>SKP</b>	<b>125.386.916</b>	<b>128</b>	<b>37.811.840</b>	<b>85,91%</b>	<b>30,16%</b>
2	25	06	1.02			<b>Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar</b>	<b>Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang dibina</b>	<b>25</b>	<b>UPI</b>	<b>125.386.916</b>	<b>16</b>	<b>37.811.840</b>	<b>64,00%</b>	<b>30,16%</b>

	2	25	06	1.02	01		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Jumlah Penerima Paket Gemarikan	150	Paket	125.386.916	0	37.811.840	0,00%	30,16%
<b>UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI</b>											<b>3.325.740.636</b>		<b>964.523.190</b>		
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>79</b>	<b>Nilai</b>	<b>2.179.487.136</b>	<b>40</b>	<b>953.374.190</b>	<b>50,63%</b>	<b>43,74%</b>	
	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>52</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1.648.271.788</b>	<b>26</b>	<b>750.794.039</b>	<b>50,00%</b>	<b>45,55%</b>	
	3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	12	Bulan	1.648.271.788	6	750.794.039	50,00%	45,55%	
	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>25.768.420</b>	<b>6</b>	<b>10.654.423</b>	<b>50,00%</b>	<b>41,35%</b>	
	3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	6.682.000	6	5.524.000	50,00%	82,67%	
	3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	12	Bulan	19.086.420	6	5.130.423	50,00%	26,88%	
	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>505.446.928</b>	<b>6</b>	<b>191.925.728</b>	<b>50,00%</b>	<b>37,97%</b>	
	3	25	01	1.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	73.282.000	6	28.905.882	50,00%	39,44%	
	3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	427.294.928	6	163.019.846	50,00%	38,15%	

3	25	01	1.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	4.870.000	6	0	50,00%	0,00%
3	25	02				<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola</b>	<b>1</b>	<b>Kawasan</b>	<b>1.146.253.500</b>	<b>1</b>	<b>11.149.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,97%</b>
3	25	02	1.01			<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan</b>	<b>1</b>	<b>Kawasan</b>	<b>1.146.253.500</b>	<b>1</b>	<b>11.149.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,97%</b>
3	25	02	1.01	02		Pengelolaan kawasan Konsevasi di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	Kawasan	1.146.253.500	1	11.149.000	100,00%	0,97%
<b>UPTD PELABUHAN PERIKANAN</b>										<b>2.220.642.738</b>		<b>928.540.979</b>		
3	3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>79</b>	<b>Nilai</b>	<b>2.220.642.738</b>	<b>40</b>	<b>928.540.979</b>	<b>50,63%</b>	41,81%
3	25	01	1.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>52</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2.019.497.882</b>	<b>26</b>	<b>838.528.491</b>	<b>50,00%</b>	41,52%
3	25	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	12	Bulan	2.019.497.882	6	838.528.491	50,00%	41,52%
3	25	01	1.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>45.483.180</b>	<b>6</b>	<b>23.480.030</b>	<b>50,00%</b>	51,62%
3	25	01	1.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	6.700.380	6	5.894.370	50,00%	87,97%
3	25	01	1.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	12	Bulan	38.782.800	6	17.585.660	50,00%	45,34%
3	25	01	1.09			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>155.661.676</b>	<b>6</b>	<b>66.532.458</b>	<b>50,00%</b>	42,74%

	3	25	01	1.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	64.148.000	6	31.995.900	50,00%	49,88%
	3	25	01	1.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	91.513.676	6	34.536.558	50,00%	37,74%
<b>UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>											<b>2.816.549.160</b>		<b>1.185.831.494</b>		
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>79</b>	<b>Nilai</b>	<b>2.596.552.560</b>	<b>40</b>	<b>1.099.619.744</b>	<b>50,63%</b>	<b>42,35%</b>	
	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	52	Dokumen	2.045.454.876	26	897.081.277	50,00%	43,86%	
	3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	12	Bulan	2.045.454.876	6	897.081.277	50,00%	43,86%	
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	34.688.900	6	4.783.880	50,00%	13,79%	
	3	25	01	1.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	12	Bulan	34.688.900	6	4.783.880	50,00%	13,79%	
	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	516.408.784	6	197.754.587	50,00%	38,29%	
	3	25	01	1.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	123.950.096	6	58.780.640	50,00%	47,42%	
	3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	392.458.688	6	138.973.947	50,00%	35,41%	

3	25	01				<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Jumlah hasil uji yang dikeluarkan	4.950	Sample	219.996.600	1.802	86.211.750	36,40%	39,19%
3	25	01	1.02			Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Jumlah Sample Produk Perikanan yang diuji	4.950	Sample	219.996.600	1.802	86.211.750	36,40%	39,19%
							Jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) yang disurveilance	25	UPI			7		28,00%
3	25	01	1.02	01		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar.	Jumlah Produk Perikanan Yang Diuji	4.950	Smample	211.496.600	1.802	77.711.750	36,40%	36,74%
3	25	01	1.02	02		Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	Jumlah UPI Yang Disurveilance	10	UPI	8.500.000	7	8.500.000	70,00%	100,00%
<b>UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT</b>										<b>4.126.097.117</b>		<b>1.844.994.926</b>		
5	3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	Nilai	4.026.097.347	40	1.752.551.035	50,63%	43,53%
3	25	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	52	Dokumen	3.461.435.363	26	1.533.754.592	50,00%	44,31%
3	25	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	12	Bulan	3.461.435.363	6	1.533.754.592	50,00%	44,31%
3	25	01	1.06			Administrasi Umum perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	36.504.600	6	13.535.000	50,00%	37,08%

3	25	01	1.06	02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	3.570.000	6	0	50,00%	0,00%
3	25	01	1.06	04		Penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	12	Bulan	32.934.600	6	13.535.000	50,00%	41,10%
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1.09</b>			<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	12	Bulan	<b>528.157.384</b>	<b>6</b>	<b>205.261.443</b>	<b>50,00%</b>	<b>38,86%</b>
3	25	01	1.09	02		Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	124.727.896	6	47.385.032	50,00%	37,99%
3	25	01	1.09	09		Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	403.429.488	6	157.876.411	50,00%	39,13%
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut</b>	<b>3</b>	<b>Komoditas</b>	<b>99.999.770</b>	<b>2</b>	<b>92.443.891</b>	<b>66,67%</b>	<b>92,44%</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1.05</b>			<b>Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut</b>	<b>Tersedianya benih, calon induk dan induk ikan air tawar dan payau</b>	<b>1.000.000</b>	<b>Ekor</b>	<b>99.999.770</b>	<b>456.125</b>	<b>92.443.891</b>	<b>45,61%</b>	<b>92,44%</b>
3	25	01	1.05	03		Penyediaan prasarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat auat dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota	tersedianya benih, benih calon induk, calon induk, induk ikan air payau/laut dan ikan air tawar yang unggul	12	Bulan	99.999.770	6	92.443.891	50,00%	92,44%

Beberapa hal penting dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan pada Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kelautan dan Perikanan tahun 2022 adalah :

**1. Realisasi program/kegiatan yang sudah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**

Dari 5 Program, 8 Kegiatan, dan 12 Sub Kegiatan. Realisasi program/kegiatan yang sudah memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada Triwulan II tahun 2022 adalah sebanyak 1 Program 2 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

Adapun beberapa permasalahan terkait faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yaitu :

- a. Kurangnya tenaga teknis di dalam pelaksanaan pembinaan pengembangan perikanan tangkap di kabupaten /kota,
- b. Adanya pembatalan beberapa pertemuan di tingkat pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menyebabkan terjadinya pengembalian biaya-biaya perjalanan dinas yang tidak terealisasi,
- c. Turunnya pagu alokasi dana dekonsentrasi Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menyebabkan turunnya standar honorarium pengelola keuangan sehingga terjadi pengembalian sisa anggaran kegiatan,
- d. Personel UPTD KKP Nusa Penida belum semua memahami teknis pengawasan dan monitoring Sumberdaya dan Sosial Ekonomi/patrol di perairan Nusa Penida,
- e. Adanya pembatasan-pembatasan pada masa pandemi covid-19 sehingga kegiatan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.

**2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**

Dari 5 Program, 8 Kegiatan, dan 12 Sub Kegiatan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; adalah : Tidak Ada

**3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:**

Dalam mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersebut dapat dilakukan beberapa hal yaitu :

- a. Memanfaatkan atau menambah SDM tenaga teknis yang ada di bidang kelautan dan perikanan,
- b. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral,

- c. Melaksanakan refocusing anggaran,
- d. Melakukan pelatihan patroli kepada personel UPTD. KKP Bali
- e. Melakukan kegiatan via daring melalui video confrence dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Data hasil evaluasi realisasi penyerapan Anggaran APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Triwulan II tahun 2022 dapat disajikan dalam tabel 2.1.6 sebagai berikut :

**Tabel 2.1.6**

Hasil evaluasi realisasi penyerapan anggaran APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Triwulan II tahun 2021

No	Program	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sisa Anggaran
<b>A</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.979.018.238	6.026.348.368	46%	6.952.669.870
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	147.182.196	34.849.820	24%	112.332.376
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	469.284.796	425.578.040	91%	43.706.756
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	125.386.916	37.811.840	30%	87.575.076
<b>B</b>	<b>UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI</b>				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.179.487.136	953.374.190	44%	1.226.112.946
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1.146.253.500	11.149.000	1%	1.135.104.500
<b>C</b>	<b>UPTD PELABUHAN PERIKANAN</b>				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.220.642.738	928.540.979	42%	1.292.101.759
<b>D</b>	<b>UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.596.552.560	1.099.619.744	42%	1.496.932.816
2	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	219.996.600	86.211.750	39%	133.784.850
<b>E</b>	<b>UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT</b>				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4.026.097.347	1.752.551.035	44%	2.273.546.312
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	99.999.770	92.443.891	92%	7.555.879

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tergolong cukup baik dilihat dari realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II tahun 2022, dengan mendapat alokasi belanja dari APBD Provinsi Bali sebanyak Rp. 26.209.901.797 dengan realisasi fisik 43,76% dan keuangan Rp. 11.448.478.657 (43,68%).

Analisis Kinerja Pelayanan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut: Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali merupakan Dinas yang tidak mengukur kinerjanya berdasarkan SPM, tetapi menggunakan NSPK dan IKK serta IKU. Norma Standar Prosedur Kegiatan telah dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, sedangkan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 IKK sebagai ukuran keberhasilan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.7 Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk jelasnya berikut disajikan dalam tabel T-C.29 (lampiran II) dan tabel T-C.30.

Tabel C-30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 Sampai dengan Triwulan II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2022 Sampai Tw II		Capaian (%)	Ket
				Target	Realisasi		
1	Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan yang di hasilkan	Ton	124.147,71	57.997,58	47%	
2	Meningkatnya Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Ekspor Produk Perikanan	Ton	26.825,31	12.621,67	47%	
3	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Pemanfaatan Ruang Laut	Kawasan	4	3	75%	

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Adapun Isu – Isu Yang Berkembang Pada Tahun 2021 Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Adalah Sebagai Berikut:

### 2.3.1 Isu-Isu

1. Belum optimalnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan;
2. Masih rendahnya daya saing produk kelautan dan perikanan;
3. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan;
4. Menurunnya kualitas ekosistem perairan umum, pesisir dan laut; dan
5. Belum optimalnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang pendapatan daerah.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dengan tetap terjaga kelestariannya;
2. Pemberdayaan masyarakat pesisir;
3. Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan;
4. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN);
5. Penggalian potensi pendapatan baru dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang telah ada.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Dalam Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD diuraikan sebagai berikut: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Akhir Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terutama hasil capaian kinerja Triwulan II Tahun 2022 dan kebutuhan tahun 2022. Alasan proses tersebut dilakukan; untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan serta menyesuaikan antara kinerja program dan kegiatan, kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan tahun 2022.

Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Akhir RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan Provinsi Bali tahun 2022, tidak perlu mengusulkan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Akhir Perubahan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda. ( Lampiran III Tabel T-C.31)

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Forum Konsultasi Publik ada beberapa Usulan Masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut :

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis di masukan dalam daftar panjang;
2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang pada nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek.

**Tabel T-C.32**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021  
Provinsi Bali**

**Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>79 Nilai</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	52 Dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan
2	<b>Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Kab. Buleleng, Kab.Karangasem</b>	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>4 Kelompok</b>
		<b>Kab. Klungkung, Kota Denpasar</b>	<b>Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola</b>	<b>1 Kawasan</b>
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi	Kab. Klungkung, Kota Denpasar	Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terkelola	1 Kawasan

	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Buleleng, Kab. Karangasem	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Garam	4 Kelompok
3	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Semua Kabupaten/Kota Provinsi Bali</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>105.165,51 Ton</b>
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali	Jumlah Data dan Sumber Daya Ikan dan Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan Perikanan Tangkap	1 Dokumen
4	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Kab. Badung, Kab. Jembrana, Kab. Klungkung</b>	<b>Jumlah Uji Coba Teknologi Komoditas Perikanan Budidaya Air Payau/Laut</b>	<b>3 Komoditas</b>
	Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut	Kab. Badung, Kab. Jembrana, Kab. Klungkung	Tingkat Produktivitas Budidaya Perikanan	14 kg/m <sup>2</sup>
5	<b>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Semua Kabupaten/Kota Provinsi Bali</b>	<b>Jumlah Produk Perikanan Bersertifikat</b>	<b>149 SKP</b>
		<b>Semua Kabupaten/Kota Provinsi Bali</b>	<b>Jumlah Hasil Uji yang dikeluarkan</b>	<b>4950 Sample</b>
	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Semua Kabupaten/Kota Provinsi Bali	Jumlah UPI yang dibina	25 UPI

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk menyusun Tujuan dan sasaran diperlukan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Bali 2018-2023. Selanjutnya pada Pada Bab III Rancangan Akhir Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, dan 3) Program dan Kegiatan

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN disusun telaahan kebijakan Kelautan dan Perikanan pada Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN. Arah Kebijakan Kelautan dan Perikanan pada RPJMN secara ringkas adalah : Mendukung ketahanan pangan, daya saing dan nilai tambah Kelautan dan Perikanan serta memelihara keberlanjutan pembangunan.

Terkait dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah :

1. Terpenuhiya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak;
2. Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian;
3. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

##### **3.2.1 Tujuan**

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali;
2. Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali;
3. Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi.

### 3.2.2 Sasaran

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan sasaran Renja adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi Perikanan;
2. Meningkatnya daya saing produk perikanan;
3. Meningkatnya pengelolaan ruang laut.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Lampiran I Tabel T-C.25 sebagaimana terlampir.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran, dikembangkan Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan Kelautan dan Perikanan berisikan penjelasan mengenai: a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain dan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan.

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>
	<b><i>1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	<b><i>2 Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	<b><i>3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>
	1 Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- 2 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**
  - 1 *Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi***
    - 1 Pengelolaan kawasan Konsevasi di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
  - 2 *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil***
    - 1 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**
  - 1 *Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil***
    - 1 Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**
  - 1 *Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut***
    - 1 Penyediaan prasarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat auat dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota
- 5 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**
  - 1 *Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar***
    - 1 Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolah dan pemasaran skala menengah dan besar
    - 2 Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN**  
**PERIKANAN PROVINSI BALI**

Pada Bab IV tentang Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan seluruh Program/Kegiatan yang terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali maka dibutuhkan dana sebesar Rp. 24.887.703.569.

Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Lampiran IV tabel T-C.33.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 sebagai dasar dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### **5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Pelaksanaan Dan Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Selain itu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 juga sebagai landasan operasional perencanaan teknis tahunan bagi Perangkat Daerah yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

#### **5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut, UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali, UPTD Pelabuhan Perikanan berkewajiban mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 serta diselaraskan dengan Perubahan RKPD Provinsi Bali tahun 2022.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 wajib dilaksanakan pengendalian dari evaluasi program dan kegiatan tahun 2022.

### 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rancangan Akhir Perubahan Rencana kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Bali, 14 September 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Bali

The image shows a circular official stamp of the Provincial Government of Bali, Department of Marine and Fisheries. The stamp contains the text "PEMERINTAH PROVINSI BALI" around the top edge and "DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Ir. Made Sudarsana, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650810 199203 1 017

## LAMPIRAN I

Tabel T-C.25  
 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun Ke-						Ket
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Bagi Krama Bali	Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan yang dihasilkan	Ton	0	0	0	121.713,44	124.147,71	126.630,66	
2	Meningkatnya Kualitas Hasil Pertanian Krama Bali	Meningkatnya Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Ekspor Produk Perikanan	Ton	0	0	0	25.516,85	26.825,31	28.166,57	
3	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Pemanfaatan Ruang Laut	Kawasan	0	0	0	3	4	5	

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
 Provinsi Bali



Ir. I Made Sudarsana, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650810 199203 1 017

## LAMPIRAN II

**TABEL T-C.29**  
**PENCAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		
								Kinerja	ANGGARAN (Rp)	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2					3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								26.209.901.797		11.448.478.657		43,68%		
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								13.720.872.146		6.524.588.068		47,55%		
1	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	Nilai	12.979.018.238	40	6.026.348.368	50,63%	46,43%
	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	52	Dokumen	11.330.640.382	26	5.321.128.656	50,00%	46,96%
	3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	11.330.640.382	6	5.321.128.656	50,00%	46,96%
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	124.712.380	6	63.859.239	50,00%	51,21%
	3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	12	Bulan	124.712.380	6	63.859.239	50,00%	51,21%
	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.523.665.476	6	641.360.473	50,00%	42,09%

3	25	01	1.09	02		Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	533.237.984	6	319.668.360	50,00%	59,95%
3	25	01	1.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	807.877.492	6	317.574.313	50,00%	39,31%
3	25	01	1.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	182.550.000	6	4.117.800	50,00%	2,26%
3	25	02				<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>4</b>	<b>Kelompok</b>	<b>147.182.196</b>	<b>0</b>	<b>34.849.820</b>	<b>0,00%</b>	<b>23,68%</b>
3	25	02	1.03			<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Meningkatnya kesejahteraan petani garam</b>	<b>4</b>	<b>Kelompok</b>	<b>147.182.196</b>	<b>0</b>	<b>34.849.820</b>	<b>0,00%</b>	<b>23,68%</b>
3	25	02	1.03	01		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok usaha garam yang difasilitas	4	Kelompok	147.182.196	0	34.849.820	0,00%	23,68%
2	25	03				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah produksi perikanan tangkap</b>	<b>105.165,51</b>	<b>Ton</b>	<b>469.284.796</b>	<b>47.756,21</b>	<b>425.578.040</b>	<b>45,41%</b>	<b>90,69%</b>
2	25	03	1.01			<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil</b>	<b>Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan dan Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan Perikanan Tangkap</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>469.284.796</b>	<b>1</b>	<b>425.578.040</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,69%</b>

2	25	03	1.01	03		Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang Mengikuti Sosialisai Perizinan Perikanan Tangkat	30	Orang	469.284.796	0	425.578.040	0,00%	90,69%
2	25	06				<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Jumlah produk yang bersertifikat</b>	<b>149</b>	<b>SKP</b>	<b>125.386.916</b>	<b>128</b>	<b>37.811.840</b>	<b>85,91%</b>	<b>30,16%</b>
2	25	06	1.02			<b>Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan</b>	<b>Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang dibina</b>	<b>25</b>	<b>UPI</b>	<b>125.386.916</b>	<b>16</b>	<b>37.811.840</b>	<b>64,00%</b>	<b>30,16%</b>
2	25	06	1.02	01		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Jumlah Penerima Paket Gemarikan	150	Paket	125.386.916	0	37.811.840	0,00%	30,16%

**UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI**

**3.325.740.636**      **964.523.190**

2	3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>79</b>	<b>Nilai</b>	<b>2.179.487.136</b>	<b>40</b>	<b>953.374.190</b>	<b>50,63%</b>	<b>43,74%</b>
3	25	01	1.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>52</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1.648.271.788</b>	<b>26</b>	<b>750.794.039</b>	<b>50,00%</b>	<b>45,55%</b>
3	25	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	12	Bulan	1.648.271.788	6	750.794.039	50,00%	45,55%
3	25	01	1.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>25.768.420</b>	<b>6</b>	<b>10.654.423</b>	<b>50,00%</b>	<b>41,35%</b>
3	25	01	1.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	6.682.000	6	5.524.000	50,00%	82,67%
3	25	01	1.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	12	Bulan	19.086.420	6	5.130.423	50,00%	26,88%

3	25	01	1.09			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	12	Bulan	<b>505.446.928</b>	<b>6</b>	<b>191.925.728</b>	50,00%	<b>37,97%</b>
3	25	01	1.09	02		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	73.282.000	6	28.905.882	50,00%	39,44%
3	25	01	1.09	09		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	427.294.928	6	163.019.846	50,00%	38,15%
3	25	01	1.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	4.870.000	6	0	50,00%	0,00%
3	25	02				<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola</b>	<b>1</b>	<b>Kawasan</b>	<b>1.146.253.500</b>	<b>1</b>	<b>11.149.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,97%</b>
3	25	02	1.01			<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan</b>	<b>1</b>	<b>Kawasan</b>	<b>1.146.253.500</b>	<b>1</b>	<b>11.149.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,97%</b>
3	25	02	1.01	02		Pengelolaan kawasan Konsevasi di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	Kawasan	1.146.253.500	1	11.149.000	100,00%	0,97%
<b>UPTD PELABUHAN PERIKANAN</b>										<b>2.220.642.738</b>		<b>928.540.979</b>		
3	3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>79</b>	<b>Nilai</b>	<b>2.220.642.738</b>	<b>40</b>	<b>928.540.979</b>	50,63%	41,81%

3	25	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>52</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2.019.497.882</b>	<b>26</b>	<b>838.528.491</b>	50,00%	41,52%
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	12	Bulan	2.019.497.882	6	838.528.491	50,00%	41,52%
3	25	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>45.483.180</b>	<b>6</b>	<b>23.480.030</b>	50,00%	51,62%
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	6.700.380	6	5.894.370	50,00%	87,97%
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	12	Bulan	38.782.800	6	17.585.660	50,00%	45,34%
3	25	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>155.661.676</b>	<b>6</b>	<b>66.532.458</b>	50,00%	42,74%
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	64.148.000	6	31.995.900	50,00%	49,88%
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	91.513.676	6	34.536.558	50,00%	37,74%
<b>UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>									<b>2.816.549.160</b>		<b>1.185.831.494</b>		
4	3	25	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>79</b>	<b>Nilai</b>	<b>2.596.552.560</b>	<b>40</b>	<b>1.099.619.744</b>	<b>50,63%</b>	42,35%
3	25	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>52</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2.045.454.876</b>	<b>26</b>	<b>897.081.277</b>	<b>50,00%</b>	<b>43,86%</b>

3	25	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	12	Bulan	2.045.454.876	6	897.081.277	50,00%	43,86%
3	25	01	1.06			<b>Administrasi Umum perangkat daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	12	Bulan	34.688.900	6	4.783.880	50,00%	13,79%
3	25	01	1.06	04		Penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	12	Bulan	34.688.900	6	4.783.880	50,00%	13,79%
3	25	01	1.09			<b>Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	12	Bulan	516.408.784	6	197.754.587	50,00%	38,29%
3	25	01	1.09	02		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	123.950.096	6	58.780.640	50,00%	47,42%
3	25	01	1.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	392.458.688	6	138.973.947	50,00%	35,41%
3	25	01				<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Jumlah hasil uji yang dikeluarkan</b>	4.950	Sample	219.996.600	1.802	86.211.750	36,40%	39,19%
3	25	01	1.02			Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Jumlah Sample Produk Perikanan yang diuji	4.950	Sample	219.996.600	1.802	86.211.750	36,40%	39,19%
							Jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) yang disurveilance	25	UPI		7		28,00%	
3	25	01	1.02	01		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar.	Jumlah Produk Perikanan Yang Diuji	4.950	Smample	211.496.600	1.802	77.711.750	36,40%	36,74%

3	25	01	1.02	02		Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	Jumlah UPI Yang Disurveilance	10	UPI	8.500.000	7	8.500.000	70,00%	100,00%
<b>UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT</b>										<b>4.126.097.117</b>		<b>1.844.994.926</b>		
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>79</b>	<b>Nilai</b>	<b>4.026.097.347</b>	<b>40</b>	<b>1.752.551.035</b>	<b>50,63%</b>	<b>43,53%</b>
	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>52</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3.461.435.363</b>	<b>26</b>	<b>1.533.754.592</b>	<b>50,00%</b>	<b>44,31%</b>
	3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	12	Bulan	3.461.435.363	6	1.533.754.592	50,00%	44,31%
	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>36.504.600</b>	<b>6</b>	<b>13.535.000</b>	<b>50,00%</b>	<b>37,08%</b>
	3	25	01	1.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	3.570.000	6	0	50,00%	0,00%
	3	25	01	1.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	12	Bulan	32.934.600	6	13.535.000	50,00%	41,10%
	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>528.157.384</b>	<b>6</b>	<b>205.261.443</b>	<b>50,00%</b>	<b>38,86%</b>

3	25	01	1.09	02		Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	12	Bulan	124.727.896	6	47.385.032	50,00%	37,99%
3	25	01	1.09	09		Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	403.429.488	6	157.876.411	50,00%	39,13%
3	25	01			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut	3	Komoditas	99.999.770	2	92.443.891	66,67%	92,44%
3	25	01	1.05			Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut	Tersedianya benih, calon induk dan induk ikan air tawar dan	1.000.000	Ekor	99.999.770	456.125	92.443.891	45,61%	92,44%
3	25	01	1.05	03		Penyediaan prasarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang penguasaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota	tersedianya benih, benih calon induk, calon induk, induk ikan air payau/laut dan ikan air tawar yang unggul	12	Bulan	99.999.770	6	92.443.891	50,00%	92,44%

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Bali



I. I Made Sudarsana, M.Si  
Pegawai Utama Muda  
NIP. 19650810 199203 1 017

## LAMPIRAN III

**TABEL T-C.31**  
**REVIEW TERHADAP RKPD PERUBAHAN PROVINSI BALI TAHUN 2022 TERHADAP HASIL ANALISIS KEBUTUHAN**

No	RKPD Perubahan Provinsi Bali				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79 Nilai	22.585.599.791	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79 Nilai	22.585.599.791	Dinas & UPTD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	52 Dokumen	19.031.102.063	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	52 Dokumen	19.031.102.063	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	267.157.480	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	267.157.480	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	3.287.340.248	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	3.287.340.248	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4 Kelompok	1.293.435.696	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4 Kelompok	1.293.435.696	Dinas
		Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan			Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan		UPTD KKP
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi	Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terkelola	1 Kawasan	1.146.253.500	Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi	Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terkelola	1 Kawasan	1.146.253.500	
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Garam	4 Kelompok	147.182.196	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Garam	4 Kelompok	147.182.196	
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	105.165,51 Ton	569.284.796	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	105.165,51 Ton	569.284.796	Dinas
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	Jumlah Data dan Sumber Daya Ikan dan Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan Perikanan Tangkap	1 Dokumen	569.284.796	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	Jumlah Data dan Sumber Daya Ikan dan Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan Perikanan Tangkap	1 Dokumen	569.284.796	
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah Uji Coba Teknologi Komoditas Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	3 Komoditas	339.383.516	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah Uji Coba Teknologi Komoditas Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	3 Komoditas	339.383.516	UPTD P2BAPL
	Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut	Tingkat Produktivitas Budidaya Perikanan	14 kg/m2	339.383.516	Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut	Tersedianya benih, calon induk dan induk ikan air tawar dan payau	1.000.000 ekor	339.383.516	

5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Perikanan Bersertifikat	149 SKP	99.999.770	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Perikanan Bersertifikat	149 SKP	99.999.770	Diaas
		Jumlah Hasil Uji yang dikeluarkan	4950 Sample			Jumlah Hasil Uji yang dikeluarkan	4950 Sample		UPTD PPMHP
	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Jumlah UPI yang dibina	25 UPI	99.999.770	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Jumlah UPI yang dibina	25 UPI	99.999.770	
TOTAL				24.887.703.569	TOTAL				24.887.703.569

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
 Provinsi Bali  
  
 Dede Sedarsana, M.Si.,  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650810 199203 1 017



## LAMPIRAN IV

Tabel T C-33

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan		Target Setelah Perubahan		Bertambah/ (Berkurang)
									Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										26.209.901.797		24.887.703.569	(1.322.198.228)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN										13.720.872.146		21.230.810.040	7.509.937.894
1	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	79	12.979.018.238	79	20.388.956.132	7.409.937.894
	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	52	11.330.640.382	52	18.688.578.276	7.357.937.894
	3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	11.330.640.382	12	18.688.578.276	7.357.937.894
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	124.712.380	12	124.712.380	0
	3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	Bulan	12	124.712.380	12	124.712.380	0
	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	1.523.665.476	12	1.575.665.476	52.000.000
	3	25	01	1.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	Bulan	12	533.237.984	12	533.237.984	0
	3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	Bulan	12	807.877.492	12	807.877.492	0
	3	25	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara rutin/berkala	Bulan	12	182.550.000	12	234.550.000	52.000.000
2	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	4	147.182.196	4	147.182.196	0

	3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya kesejahteraan petani garam	Kelompok	4	147.182.196	4	147.182.196	0
	3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok usaha garam yang difasilitasi	Kelompok	4	147.182.196	4	147.182.196	0
3	2	25	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah produksi perikanan tangkap</b>	<b>Ton</b>	<b>105.165,51</b>	<b>469.284.796</b>	<b>105.165,51</b>	<b>569.284.796</b>	<b>100.000.000</b>
	2	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan dan Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan Perikanan Tangkap	Dokumen	1	469.284.796	1	569.284.796	100.000.000
	2	25	03	1.01	03	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang Mengikuti Sosialisasi Perizinan Perikanan Tangkap	Orang	30	469.284.796	30	569.284.796	100.000.000
4	2	25	06			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Jumlah produk yang bersertifikat</b>	<b>SKP</b>	<b>149</b>	<b>125.386.916</b>	<b>149</b>	<b>125.386.916</b>	<b>0</b>
	2	25	06	1.02		Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang dibina	UPI	25	125.386.916	25	125.386.916	0
	2	25	06	1.02	01	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Jumlah Penerima Paket Gemarikan	Paket	150	125.386.916	150	125.386.916	0
<b>UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI</b>										<b>3.325.740.636</b>		<b>1.742.674.848</b>	<b>(1.583.065.788)</b>
1	3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>79</b>	<b>2.179.487.136</b>	<b>79</b>	<b>596.421.348</b>	<b>(1.583.065.788)</b>
	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	52	1.648.271.788	52	65.206.000	(1.583.065.788)
	3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	Bulan	12	1.648.271.788	12	65.206.000	(1.583.065.788)
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	25.768.420	12	25.768.420	0
	3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	6.682.000	12	6.682.000	0

	3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	Bulan	12	19.086.420	12	19.086.420	0
	3	25	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	Bulan	12	<b>505.446.928</b>	12	<b>505.446.928</b>	<b>0</b>
	3	25	01	1.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	Bulan	12	73.282.000	12	73.282.000	0
	3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	Bulan	12	427.294.928	12	427.294.928	0
	3	25	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara rutin/berkala	Bulan	12	4.870.000	12	4.870.000	0
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola</b>	<b>Kawasan</b>	<b>1</b>	<b>1.146.253.500</b>	<b>1</b>	<b>1.146.253.500</b>	<b>0</b>
	3	25	02	1.01		<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan</b>	<b>Kawasan</b>	<b>1</b>	<b>1.146.253.500</b>	<b>1</b>	<b>1.146.253.500</b>	<b>0</b>
	3	25	02	1.01	02	Pengelolaan kawasan Konsevasi di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Kawasan	1	1.146.253.500	1	1.146.253.500	0
<b>UPTD PELABUHAN PERIKANAN</b>										<b>2.220.642.738</b>		<b>275.398.856</b>	<b>(1.945.243.882)</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>79</b>	<b>2.220.642.738</b>	<b>79</b>	<b>275.398.856</b>	<b>(1.945.243.882)</b>
	3	25	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>52</b>	<b>2.019.497.882</b>	<b>52</b>	<b>74.254.000</b>	<b>(1.945.243.882)</b>
	3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	Bulan	12	2.019.497.882	12	74.254.000	(1.945.243.882)
	3	25	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>45.483.180</b>	<b>12</b>	<b>45.483.180</b>	<b>0</b>
	3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	6.700.380	12	6.700.380	0
	3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	Bulan	12	38.782.800	12	38.782.800	0

	3	25	01	1.09			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	Bulan	12	<b>155.661.676</b>	12	<b>155.661.676</b>	<b>0</b>
	3	25	01	1.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	Bulan	12	64.148.000	12	64.148.000	0
	3	25	01	1.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	Bulan	12	91.513.676	12	91.513.676	0
<b>UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>											<b>2.816.549.160</b>	<b>848.158.871</b>	<b>(1.968.390.289)</b>	
<b>1</b>	3	25	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>79</b>	<b>2.596.552.560</b>	<b>79</b>	<b>634.162.271</b>	<b>(1.962.390.289)</b>
	3	25	01	1.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>52</b>	<b>2.045.454.876</b>	<b>52</b>	<b>77.064.587</b>	<b>(1.968.390.289)</b>
	3	25	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	Bulan	12	2.045.454.876	12	77.064.587	(1.968.390.289)
	3	25	01	1.06			<b>Administrasi Umum perangkat daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>34.688.900</b>	<b>12</b>	<b>34.688.900</b>	<b>0</b>
	3	25	01	1.06	04		Penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	Bulan	12	34.688.900	12	34.688.900	0
	3	25	01	1.09			<b>Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>516.408.784</b>	<b>12</b>	<b>522.408.784</b>	<b>6.000.000</b>
	3	25	01	1.09	02		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	Bulan	12	123.950.096	12	123.950.096	0
	3	25	01	1.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	Bulan	12	392.458.688	12	398.458.688	6.000.000
<b>2</b>	3	25	01				<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Jumlah hasil uji yang dikeluarkan</b>	<b>Sample</b>	<b>4.950</b>	<b>219.996.600</b>	<b>4.950</b>	<b>213.996.600</b>	<b>(6.000.000)</b>
	3	25	01	1.02			<b>Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar</b>	<b>Jumlah Sample Produk Perikanan yang diuji dan Jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) yang disurveilance</b>	<b>Sample; UPI</b>	<b>4950; 25</b>	<b>219.996.600</b>	<b>4950; 25</b>	<b>213.996.600</b>	<b>(6.000.000)</b>

	3	25	01	1.02	01		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolah dan pemasaran skala menengah dan besar.	Jumlah Produk Perikanan Yang Diuji	Smagle	4.950	211.496.600	4.950	205.496.600	(6.000.000)
	3	25	01	1.02	02		Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	Jumlah UPI Yang Disurveilance	UPI	10	8.500.000	7	8.500.000	0
<b>UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT</b>											<b>4.126.097.117</b>		<b>790.660.954</b>	<b>(3.335.436.163)</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>79</b>	<b>4.026.097.347</b>	<b>79</b>	<b>690.661.184</b>	<b>(3.335.436.163)</b>
	3	25	01	1.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>52</b>	<b>3.461.435.363</b>	<b>52</b>	<b>125.999.200</b>	<b>(3.335.436.163)</b>
	3	25	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	Bulan	12	3.461.435.363	12	125.999.200	(3.335.436.163)
	3	25	01	1.06			<b>Administrasi Umum perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>36.504.600</b>	<b>12</b>	<b>36.504.600</b>	<b>0</b>
	3	25	01	1.06	02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	3.570.000	12	3.570.000	0
	3	25	01	1.06	04		Penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	Bulan	12	32.934.600	12	32.934.600	0
	3	25	01	1.09			<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>528.157.384</b>	<b>12</b>	<b>528.157.384</b>	<b>0</b>
	3	25	01	1.09	02		Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	Bulan	12	124.727.896	12	124.727.896	0
	3	25	01	1.09	09		Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	Bulan	12	403.429.488	12	403.429.488	0
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut</b>	<b>Komoditas</b>	<b>3</b>	<b>99.999.770</b>	<b>3</b>	<b>99.999.770</b>	<b>0</b>
	3	25	01	1.05			<b>Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut</b>	<b>Tersedianya benih, calon induk dan induk ikan air tawar dan payau</b>	<b>Ekor</b>	<b>1.000.000</b>	<b>99.999.770</b>	<b>1.000.000</b>	<b>99.999.770</b>	<b>0</b>

3	25	01	1.05	03	<p>Penyediaan prasarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota</p>	<p>tersedianya benih, benih calon induk, calon induk, induk ikan air payau/laut dan ikan air tawar yang unggul</p>	Bulan	12	99.999.770	12	99.999.770	0
---	----	----	------	----	---	--	-------	----	------------	----	------------	---

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
 Provinsi Bali



Wahid Sudarsana, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650810 199203 1 017



ပိတိန္တု ဂျပၢ်ပိတုၢ် ဗၢ်လိ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
မိၢ်ကၢၤလိၤစံၤပူၤဖၢၤကၢၤမိၢ်ကၢၤလိၤစံၤပူၤဖၢၤ  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ကၢၤမိၢ်ကၢၤလိၤစံၤပူၤဖၢၤကၢၤမိၢ်ကၢၤလိၤစံၤပူၤဖၢၤ - ဗၢ်လိ (ပိတုၢ်ပိတုၢ်)  
JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR - BALI (80234)  
၇၇၇၇၇၇၇၇ (ပိတုၢ်ပိတုၢ်) ၇၇၇၇၇၇၇၇  
TELEPON (0361), 223562  
WEBSITE: [www.diskelkan.baliprov.go.id](http://www.diskelkan.baliprov.go.id) EMAIL: [diskelkan@baliprov.go.id](mailto:diskelkan@baliprov.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

NOMOR : 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

- Menimbang :
- bahwa untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA);
  - bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rencana Kerja dipandang perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 nomor 6 tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Darah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- Menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
  - mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
  - menggandakan dan menyampaikan hasil dokumen Rencana Kerja kepada Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali; dan
  - melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 26 Maret 2021  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN PROVINSI BALI,



Ir. MADE SUDARSANA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650810 199203 1 017

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Inspektorat Provinsi Bali di Denpasar.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
- Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
- Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 exemplar).
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI BALI  
NOMOR : 18 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN TIM TEKNIS  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
(RENJA) TAHUN 2022 DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

- Penanggung Jawab** : Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.
- Ketua** : Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.
- Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan  
Pelaopran.
- Anggota** : 1. Kepala Bidang Kelautan  
2. Kepala Bidang Perikanan  
3. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan  
4. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan  
Perikanan  
5. Kepala UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali  
6. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan  
7. Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil  
Perikanan  
8. Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air  
Payau/Laut

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 26 Maret 2021  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN PROVINSI BALI,



Ir. IMADE SUDARSANA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650810 199203 1 017